

Urban Farming dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat Perkotaan

I Dewa Gede Putra Sedana¹, Ni Luh Putu Ening Permini²

Universitas Ngurah Rai

Alamat: Jl. Kampus Ngurah Rai No.30, Penatih, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar,
Bali 80238;Telepon: (0361) 462617
Korespondensi penulis : ening.permini@unr.ac.id

ABSTRAK. *Urban farming* selama ini telah digagas oleh berbagai aktor meliputi: pemerintah, sektor swasta, maupun kelompok masyarakat. Pada penelitian ini berguna untuk mengetahui analisis dalam melihat pelaksanaan *urban farming* di Kota Denpasar. Penelitian ini membahas tentang perbedaan peran *urban farming* antara program pemerintah kota dan organisasi independen, dilihat dari sumberdaya juga melalui kegagalan kebijakan dan kegagalan pasar melalui pendekatan kualitatif. Kegagalan kebijakan disebabkan kebijakan pertanian yang digagas oleh Pemerintah Kota kurang berhasil dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan inovasi melalui *urban farming* yang dibentuk secara *top down*. Sedangkan, kegagalan pasar terjadi pada *urban farming* di Kota Bandung dikarenakan ketidaknyamanan masyarakat terhadap produk yang beredar di pasar. Hal ini merupakan salah satu motif dominan munculnya *urban farming bottom up* oleh kelompok organisasi independen. Sementara, sumber pemodal *urban farming* adalah berupa sarana pendukung sarana tanam, instalasi hidroponik, dan pembuatan *greenhouse*, namun pemodal *urban farming* yang dibentuk organisasi independen bersumber dari kontribusi anggota masyarakat koperasi dan dana bank. Aspek penting yang dibutuhkan oleh kelompok organisasi independen yaitu mengefisienkan biaya operasional dengan mengetahui cara menggunakan kembali barang bekas menjadi barang-barang yang produktif.

Kata kunci: *Urban Farming*, kelompok binaan, ketahanan pangan.

ABSTRACT. *Urban farming* has so far been initiated by various actors including: the government, the private sector, and community groups. In this study it is useful to find out the analysis in looking at the implementation of *urban farming* in Denpasar City. This study discusses the differences in the role of *urban farming* between city government programs and independent organizations, in terms of resources as well as through policy failures and market failures through a qualitative approach. The failure of the policy was due to the agricultural policy initiated by the City Government being less successful in meeting the food needs of the people. Therefore innovation is needed through *top down urban farming*. Meanwhile, market failure occurred in *urban farming* in the city of Bandung due to people's discomfort with the products circulating in the market. This is one of the dominant motives for the emergence of *bottom-up urban farming* by independent organizational groups. Meanwhile, the sources of capital for *urban farming* are in the form of supporting facilities for planting facilities, hydroponic installations, and making greenhouses, but the capital for *urban farming* formed by independent organizations comes from contributions from members of the cooperative community and bank funds. An important aspect needed by independent organizational groups is to streamline operational costs by knowing how to reuse used goods into productive goods.

Keywords: *Urban Farming*, target groups, food security.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, konsep *urban farming* telah digagas oleh berbagai aktor meliputi: pemerintah, sektor swasta, maupun kelompok masyarakat. Strategi pertanian perkotaan berkelanjutan melalui implementasi *urban farming* telah diterapkan di berbagai belahan dunia. Tujuannya untuk merespon kebutuhan pangan masyarakat perkotaan yang sangat tinggi sedangkan daerah perkotaan mengalami kekurangan lahan untuk produksi pangan (Smith, 2016). Penerapan *urban farming* di berbagai wilayah terancam dengan fenomena dikontinuitas (ketidakberlanjutan).

Untuk menghadapi masalah diskontinuitas dalam pengelolaan pertanian perkotaan yang berkelanjutan diperlukan orientasi pada peningkatan peran aktor di perkotaan. Hasil penelitian Bauw (2015) menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam mengikuti praktik pertanian perkotaan dapat meningkatkan 40 persen ketersediaan pangan. Oleh sebab itu, peran aktor dalam pengelolaan pertanian berkelanjutan sangat dibutuhkan karena orang kota merupakan konsumen yang kurang berselera dengan sayuran dan buah yang ada di pasar kota terkait kandungan pestisida dan campuran obat-obatan. Hal ini mendorong aktivitas pertanian subsisten di lingkungan perkotaan yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan sisa lahan di sekitar rumah.

Disisi lain ditemukan beberapa kelompok tani kota (*urban farming*) independen yang belum terlembaga secara formal tanpa meminta bantuan pemerintah setempat dalam hal pendampingan secara teknis. Peran *urban farming* terhadap ketahanan pangan rumah tangga berdasarkan perspektif *political ecology* dilihat dari *urban farming* berbasis subsisten yang merupakan pertanian perkotaan di mana dipergunakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dalam *scope* rumah tangga. Salah satu fungsi pertanian perkotaan berperan dalam memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat perkotaan (Smith et al, 2001).

Perubahan hubungan dalam arti produsen yang memproduksi makanan dengan konsumen tidak dapat dipisahkan dari perubahan interaksi di tingkat global dengan kebijakan regional dan nasional saat ini (Schermer, 2015). Tentu saja, *urban farming* berbasis subsisten dicakup oleh dinamika kebijakan yang mendasari penerapan *urban farming* berbasis subsisten sebagai skema untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini menandakan bahwa kegagalan kebijakan (*policy failure*) pada *urban farming* berbasis subsisten terjadi karena perbedaan antara pedesaan dan perkotaan yang terkait dengan hubungan pedesaan-perkotaan dimana tidak merata. Sementara,

daerah perkotaan mengkonsumsi lebih banyak sumber daya, seperti: tanah, makanan, dan energi, tetapi tidak mengembalikan sumber daya ini. Ini menunjukkan bahwa kota membutuhkan lebih dari memberi (Edwards, 2014).

Sedangkan kegagalan pasar (*market failure*) dalam konteks pertanian, salah satunya ditandai dengan peredaran produk pestisida ilegal di pasar dengan permintaan tinggi. Hal ini diketahui dari laporan FAO yang bekerja sama dengan WHO, mereka menyatakan bahwa 30% pestisida yang diimpor dan dipasarkan di negara berkembang tidak memenuhi syarat untuk standar kualitas internasional (Zimba and Zimudzi, 2016). Penggunaan pestisida yang berada di bawah standar dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pencemaran makanan, air minum, dan lingkungan serta organisme akuatik yang menyebabkan efek buruk pada kesehatan manusia dan lingkungan (Zimba and Zimudzi, 2016). Ketidakmampuan pasar untuk membendung produk pestisida ilegal adalah bentuk kegagalan. Di sisi lain, konsumen mengetahui konten produk yang beredar melalui informasi yang diperoleh dari produsen lain dari pasar petani dan teknologi komunikasi. Pada akhirnya, konsumen memiliki preferensi untuk membeli produk yang ramah lingkungan (Carson et al, 2015).

KAJIAN PUSTAKA

urban farming

Urban farming merupakan istilah yang merujuk pada kegiatan bercocok tanam atau beternak secara mandiri di wilayah perkotaan. Biasanya, kegiatan ini memanfaatkan lahan yang terbatas, seperti pekarangan rumah. Menurut Bareja, 2010, Urban farming atau urban agriculture adalah kegiatan budidaya tanaman atau memelihara hewan ternak di dalam dan di sekitar wilayah kota besar (metropolitan) atau kota kecil untuk memperoleh bahan pangan atau kebutuhan lain dan tambahan finansial.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini berguna untuk mengetahui analisis dalam melihat pelaksanaan *urban farming* di Kota Denpasar. Penelitian ini membahas tentang perbedaan peran *urban farming* antara program pemerintah kota dan organisasi independen, dilihat dari sumberdaya juga melalui kegagalan kebijakan dan

kegagalan pasar melalui pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Pertanian Perkotaan

Model pertanian kota (*urban farming*) subsisten bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Berdasarkan sumber pembentukannya, model kegiatan di Kota Bandung dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu *urban farming* yang dibentuk oleh pemerintah kota dan dibentuk oleh organisasi independen. Berikut klasifikasi model *urban farming* yang dibentuk oleh pemerintah dan *urban farming* yang dibentuk secara mandiri oleh kelompok organisasi independen.

Motif sebagian besar anggota terlibat dalam kelompok *urban farming* adalah untuk menyalurkan hobi. Motif kesetaraan kepentingan ini rawan terjadi diskontinuitas karena tidak semua warga di RW memiliki minat yang sama dalam bercocok tanam. Oleh karena itu, beberapa kelompok *urban farming* yang ada mengalami kevakuman karena tidak ada warga yang berminat. Namun karena aktivitas anggota PKK, pengelolaan *urban farming* diambil alih oleh KWT yang ada di setiap desa/ kelurahan. Motivasi yang dimiliki para aktivis dari *urban farming* independen adalah kesadaran kritis terhadap produk sayur dan buah di pasaran yang mengandung pestisida buatan yang berbahaya jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Motif lainnya adalah untuk menghemat pengeluaran rumah tangga. Manfaat yang dihasilkan dari kegiatan *urban farming* ini telah mengurangi pengeluaran rumah tangga karena rumah tangga hanya membeli beras dan lauk pauk sebagai konsumsi tambahan.

Metode produksi *urban farming* organisasi independen menggunakan hidroponik, vertikultur, dan aquaponik. Bahan pangan yang dihasilkan oleh *urban farming*, meliputi: cabai, kangkung, stroberi, dan tomat. Preferensi pemilihan jenis tanaman didasarkan pada permintaan pelanggan. Anggota kelompok *urban farming* independen yang melakukan kegiatan penjualan memiliki motto: “ kualitas di atas supermarket, harga di bawah supermarket” sebagai strategi pemasaran yang efektif untuk mendapatkan pelanggan. Pelanggan tersebut berasal dari tetangga dan orang-orang yang sering berlalu lalang di sekitar kawasan *urban farming*. Saat ini, sayuran yang paling diminati oleh pelanggan adalah kubis, kangkung, dan daun bawang. Oleh karena itu, sebagian besar petani *urban farming* juga memilih jenis tanaman tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa pertimbangan masyarakat *urban farming* independen didasarkan

pada nilai komersial yang mempengaruhi perilaku produksi

Kegagalan kebijakan dan kegagalan pasar

Implementasi *urban farming* perlu dipahami dari perspektif ekologi politik untuk mengidentifikasi motivasi dari kegagalan kebijakan dan kegagalan pasar. Kegagalan kebijakan terjadi ketika kemampuan untuk menavigasi masalah yang ada telah jatuh (McConnell, 2015). Suatu kebijakan dapat dikatakan gagal karena kebijakan itu sendiri tidak dapat diimplementasikan secara memadai atau ketika suatu tujuan tidak mencapai target (Kerr dalam McConnell, 2015). Kegagalan kebijakan pada *urban farming* terjadi karena perbedaan antara pedesaan dan perkotaan, ini terkait dengan hubungan pedesaan-perkotaan yang tidak merata. Sementara, daerah perkotaan mengkonsumsi lebih banyak sumber daya, seperti: tanah, makanan, dan energi, tetapi tidak mengembalikan sumber daya ini. Ini menunjukkan bahwa kota membutuhkan lebih dari memberi (Edwards, 2014).

Urban farming oleh pemerintah daerah dilatarbelakangi oleh strategi untuk mengurangi ketergantungan pangan dari daerah lain. Pemerintah Kota Bandung kesulitan mengembangkan pertumbuhan pertanian konvensional di kotanya. Akibat, ketergantungan pada sumber pasokan pangan dari daerah pinggiran kota sangat tinggi. Oleh karena itu, fenomena ini disebut sebagai kegagalan kebijakan dimana kebijakan pertanian yang digagas oleh Pemerintah Kota kurang berhasil dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kota Denpasar. Ketergantungan suplai pangan dari luar kota Bandung menyebabkan ketidakstabilan harga pangan. Respon kegagalan kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan mandiri tersebut

Inovasi *urban farming* yang dibentuk secara *top down* oleh Pemerintah Kota

Urban farming juga dilatarbelakangi oleh upaya Pemerintah Kota Bandung untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hal tersebut menunjukkan bahwa RTH masih belum tercukupi di Kota Denpasar. Dengan demikian, ketidakmampuan pemerintah daerah dalam RTH diatasi dengan program *urban farming*. Sedangkan kegagalan pasar dalam konteks pertanian, salah satunya ditandai dengan peredaran produk pestisida ilegal di pasar dengan permintaan tinggi. Motivasi para pegiat dari *urban farming* organisasi independen adalah kesadaran kritis terhadap produk sayur dan buah di pasaran yang mengandung pestisida buatan yang berbahaya jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Penggunaan pestisida yang di atas standar dapat berdampak signifikan mencemari makanan, air minum, dan lingkungan (Zimba

and Zimudzi , 2016).

Oleh karena itu, ada oknum petani pemasok sayuran di supermarket yang menggunakan NPK dan pupuk urea untuk mengejar produktivitas dengan cara yang tidak membutuhkan banyak biaya, waktu, dan tenaga. Penggunaan pestisida kimiawi buatan, seperti: penggunaan *organofosfat, karbamat, piretroid, dan organoklorin* yang sering digunakan dalam pertanian perkotaan (Bon, Parrot, and Moustier , 2008) telah mendorong kesadaran penduduk di perkotaan untuk melakukan penanaman pangan. Berdasarkan pengetahuan tersebut, pemilik AF melakukan kegiatan *urban farming* dengan menghadirkan konsumsi sayur dan buah sehat yang jarang ditemui di pasaran. Hal ini menunjukkan bahwa pasar gagal menjaga ketahanan pangan yang sehat dan bebas pestisida anorganik dalam rumah tangga, terutama pada pangan seperti sayuran. Sehingga produk campuran organik dan anorganik berpotensi beredar dan dipasarkan di supermarket.

Fenomena kegagalan pasar terjadi pada dimensi *urban farming* di Bandung. Ketidaknyamanan masyarakat terhadap produk yang beredar di pasar merupakan salah satu motif dominan munculnya *urban farming bottom up* oleh organisasi independen. Upaya menghadirkan produk yang sehat dan ramah lingkungan menjadi salah satu tujuan *urban farming* organisasi independen karena gagal menghadirkan pangan organik yang terjangkau oleh pasar.

Sumber pemodal *urban farming* yang dibentuk adalah mendapatkan sarana pendukung sarana tanam, instalasi hidroponik, dan pembuatan *greenhouse*. DKPP Kota Denpasar juga memberikan pendampingan sesuai dengan kebutuhan kelompok. Misalnya, menyediakan bibit, pembibitan, dan kolam ikan. Situasi tak terduga terjadi dalam *urban farming* organisasi independen. Pemodal *urbanfarming* yang dibentuk organisasi independen bersumber dari kontribusi anggota masyarakat koperasi dan dana bank. Modal yang dikeluarkan oleh petani *urban farming* dari masyarakat mandiri bergantung pada kreativitas masing-masing petani dalam mengalokasikan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, aspek penting yang harus dibutuhkan oleh organisasi independen untuk mengefisienkan biaya operasional adalah dengan mengetahui caramenggunakan kembali barang bekas menjadi barang-barang yang produktif. Pengetahuanterkait intervensi pengolahan organik juga penting sebagai upaya meminimalisasi biaya produksi pupuk dan pestisida.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan *urban farming* yang diimplementasikan berdasarkan perspektif *political ecology* diketahui dari *policy failure* (kegagalan kebijakan) dan *market failure* (kegagalan pasar). Kegagalan kebijakan disebabkan kebijakan pertanian yang digagas oleh Pemerintah Kota kurang berhasil dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kota Bandung. Oleh karena itu dibutuhkan inovasi melalui *urban farming* yang dibentuk secara *top down* oleh Pemerintah Kota melalui DKPP. Sedangkan, kegagalan pasar terjadi pada *urban farming* di Kota Bandung dikarenakan ketidaknyamanan masyarakat terhadap produk yang beredar di pasar. Hal ini merupakan salah satu motif dominan munculnya *urban farming bottom up* oleh kelompok organisasi yang ada. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan sumber daya lahan dan dan ketahanan pangan skala rumah tangga maupun daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bauw. (2015). Gerakan Urban Farming: Studi atas Mobilisasi Sumber Daya oleh Komunitas Bandung Berkebun. Diakses dari <http://etd.repository.ugm.ac.id//>.
- Bon, H. D., Parrot, Lauren., & Moustier, Paule. (2010). Sustainable Urban Agriculture in Developing Countries A. Review. *Agronomy for Sustainable Development*, 30(1), 21-32.
- Bishop, R., & Coughenour, C. M. (1961). Discontinuance of Farm Innovations. Ohio State University, Department of Agricultural, Environmental and Development Economics. Diakses dari <http://hdl.handle.net/1811/70032>
- Carson, R. A., Hamel, Z., Giarrocco, K., Baylor, R., & Mathews, L. G. (2015). Buying in: The Influence of Interactions at Farmers Markets. *Agric Hum Values*, 33, 861-875.
- Creswell, J. W. (2014). A concise introduction to mixed methods research. Publikasi Sage, California.
- Edwards. F. (2014). Urban Agriculture as a Solution to the Problem of Urbanization in the City of Bandung. Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Glaser, B. & Strauss, A, (1967). Penemuan Teori Beralas: Strategi untuk Riset Kualitatif, dalam Thomson, Stanley, Bruce., (2011). "Ukuran Sampel dan Teori Beralas". Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/228513695_Sample_Size_and_Grounded_Theory/link/57cdf1ea08ae057987aabd39/download.
- Schermer. M. (2015). From "Food from Nowhere" to "Food from Here." Changing Producer-Consumer Relations in Africa. *Agric Hum Values*, 32, 121-132.
- Smith. J., Nasr. J., & Ratta. A. (2001). Urban Agriculture Food, Jobs and Sustainable Cities.

The Urban Agriculture Network, Inc.

Smit, W. (2016). Urban Governance and Urban Food Systems in Africa: Examining the Linkages. *Cities*, 58(2016), 80-86.

Tacoli, C. (1998). Beyond the rural–urban divide. *Special edition of Environment and Urbanization*, 10(1).